

REFLEKSI IDEOLOGI WANITA MINANGKABAU DALAM NOVEL *NEGERI PEREMPUAN* KARYA WISRAN HADI

Yasnur Asri*

ABSTRACT

This study aims at describing ideology of Minangnese women reflected in the novel Negeri Perempuan by Wisran Hadi. This study was conducted based on some theories on ideology and deconstruction. The data were analyzed by hermeneutics which provides descriptive analysis. Analytical descriptive method aims at describing, systematic descriptions of facts and evidence, and the connection between phenomena studied. Woman ideology in this novel was formulated by deconstruction critical method and sociological approach in literature. The findings of this study found out that there are two ideologies - social ideology and political ideology. The dominant social ideology is feudal and nofeudal ideologies. Feudal ideology is reflected in the woman as the main character who views that the royal heritage and the cultural ceremony of penghulu must be culturally based. However, nofeudal ideology is reflected in leaderships' wives and conglomerates' brothers and sisters who view it flexibel in relevance with the current situation, not rituals. Political ideology reflected in this novel has two potentials-positive and negative potentials. Positive ideology is indicated by the activities done in by royal family, while negative ideology is reflected in activities done by families not coming from the royal families.

Keywords: *deconstruction, hermeneutics, ideology, Minangnese women, reflection*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi bentuk ideologi wanita Minangkabau yang terefleksi dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi. Penelitian ini dilakukan berlandaskan teori-teori ideologi dan dekonstruksi. Metode analisis data menggunakan metode hermeneutika. Metode hermeneutika memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk analisis deskriptif. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau uraian secara sistematis faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang dikaji. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa ada dua bentuk ideologi yang terefleksi dalam novel ini, yakni ideologi sosial dan ideologi politik. Ideologi sosial yang menonjol adalah ideologi feodal dan neofeodal. Ideologi feodal terefleksi pada tokoh perempuan pewaris kerajaan yang selalu berpandangan masalah warisan dan tata cara pengangkatan penghulu sesuai dengan aturan adat yang berlaku, sedangkan ideologi neofeodal yang didukung oleh tokoh perempuan istri pejabat dan saudara konglomerat yang berpandangan bahwa tata cara warisan dan tata cara pengangkatan penghulu itu bukanlah sesuatu yang sakral, tetapi amat fleksibel dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian. Ideologi politik yang terefleksi dalam novel ini mempunyai dua corak, yaitu ideologi politik yang berpretensi positif dan yang berpretensi negatif. Ideologi positif terlihat dari aktivitas keluarga pewaris kerajaan, sedangkan ideologi yang berpretensi negatif terefleksi dari aktivitas keluarga di luar pewaris kerajaan.

Kata Kunci: dekonstruksi, hermeneutika, ideologi, refleksi, wanita Minangkabau

* Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat

PENGANTAR

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya mengkaji ideologi wanita Minangkabau yang terefleksi dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi. Pertama, budaya Minangkabau sangat unik dibandingkan budaya nusantara lainnya. Budaya Minangkabau menganut sistem matriakat yang menempatkan posisi perempuan (di Minangkabau dilambangkan dengan predikat *Bundo Kanduang*) sebagai figur sentral dalam keluarga. Semua persoalan dalam keluarga selalu dinisbatkan kepadanya dan dia adalah penentu kebijaksanaan keluarga. Dalam artian ideal-abstrak-filosofi, *Bundo Kanduang* adalah perlambang dan sekaligus personifikasi dari budaya Minangkabau itu sendiri. Posisi laki-laki dalam keluarga hanya berfungsi sebagai periferal. Ia hanya bertugas sebagai pelindung keluarga, termasuk dalam hal harta warisan keluarga. Oleh karena itu, mamak (paman) dalam budaya Minangkabau hanya berfungsi sebagai protektoral dan seremonial untuk berhadapan dengan dunia luar. Maksudnya adalah apa yang disampaikan kepada dunia luar adalah suara keluarga yang sebelumnya telah dimufakati dan diputuskan *Bundo Kandung*. Dengan sistem matrilineal itu, budaya Minangkabau memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memiliki.

Wisran Hadi sebagai pengarang novel *Negeri Perempuan* tentulah menulis berlatarbelakang budaya Minangkabau, budaya yang menganut sistem matrilineal, yang memosisikan wanita sebagai pewaris harta dan keturunan berdasarkan garis Ibu tersebut. Di samping itu, Wisran juga mempunyai seorang istri yang merupakan seorang wanita pewaris kerajaan Minangkabau. Dengan dasar pemikiran itu tentu banyak sedikitnya, ia menjadikan permasalahan budaya dan kehidupannya itu sebagai objek permasalahan novelnya. Novel *Negeri Perempuan* yang ditulisnya pada tahun 2011 merupakan alat bagi Wisran untuk memaparkan dilema ideologi wanita di Negeri Perempuan (Minangkabau) dan alat untuk mengemukakan visi, reaksi dan opininya terhadap budaya Minangkabau. Hal semacam inilah yang menjadi salah satu alasan lain mengapa penting mengkaji bentuk

ideologi wanita Minang yang terefleksi dalam novel *Negeri Perempuan* ini. Dengan mengetahui bentuk ideologi wanita itu sebagai salah satu produk budaya Minangkabau kita akan dapat mengetahui sejauh mana ideologi itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat, sebab karya sastra itu pada hakikatnya selalu disinari oleh nilai-nilai yang ditetapkan dan yang diterapkan. Oleh sebab itu yang dilakukan pengarang adalah meyakinkan dan menunjukkan bahwa sastra betul-betul berinteraksi dengan kehidupan individu-individu di tengah masyarakat (Hoggart, 1975).

Kedua, masalah harta pusaka dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta *pusako tinggi* (pusaka tinggi) yang tidak dapat dibagi maupun dimiliki. Sistem budaya Minangkabau memiliki cara tersendiri dalam memanfaatkan dan mengelola harta pusaka. Demikian juga dengan sistem perkawinan, budaya Minangkabau lebih mengutamakan kawin antar keluarga yang dalam budaya Minangkabau sering diistilahkan dengan kawin *awak samo awak* yang dipersonifikasikan *kuah tatuang ka nasi* (kuah tertumpah ke nasi) atau *pulang ka bako*, sehingga amat berbeda dibandingkan budaya lainnya. Keunikan-keunikan budaya yang seperti ini menarik untuk dikaji bukan hanya karena ceritanya yang menarik, tetapi permasalahan yang dipotret pun merupakan potret kehidupan sosial budaya Minangkabau zaman sekarang, yakni permasalahan kehidupan sosiobudaya masyarakat Minangkabau pasca-reformasi.

Berdasarkan kedua alasan di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama yang ingin dijawab melalui kajian ini adalah bagaimanakah bentuk ideologi wanita Minangkabau yang terefleksi dalam novel *Negeri Perempuan*? Untuk menjawab permasalahan itu, landasan teoretis yang digunakan adalah teori ideologi Gramsci dan dekonstruksi. Althusser (2008) menyatakan bahwa ada empat inti pengertian ideologi. Keempat pengertian itu adalah: (1) ideologi memiliki fungsi umum dalam pembentukan subjek; (2) ideologi sebagai pengalaman hidup bukanlah kepalsuan; (3) ideologi sebagai kesalahpahaman dalam mengetahui kondisi riil kenyataan adalah palsu;

dan (4) ideologi terlibat dalam reproduksi formasi sosial dan relasi kekuasaan. Ideologi memiliki dua watak, yakni sebagai *lived experience* yang merepresentasikan kondisi kehidupan nyata masyarakat, dan sebagai ilusi, ia tidak nyata dan bersifat imajinatif.

Menurut Gramsci (1985) sastra adalah situs ideologi. Oleh karena itu, untuk menggali ideologi suatu kelompok etnis tertentu dapat dilakukan dengan memahami gagasan, konsep, dan pandangan yang direpresentasikan oleh para pemikirnya. Di samping melalui dokumen kesejarahan, gagasan, konsep, dan pandangan tersebut juga dapat ditelusuri melalui karya-karya budaya. Salah satu wujud hasil kebudayaan tersebut adalah karya sastra. Karya sastra dapat menjadi sarana bagi pengarang untuk merepresentasikan pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu peristiwa. Pikiran, gagasan, dan pandangan pengarang tersebut dapat berkaitan dengan adat dan agama yang dituangkan dalam karya sastra.

Sebagai situs ideologi di dalam karya sastra pengarang secara sengaja atau tidak, mengemukakan konsep hidup atau ideologi yang dianutnya. Ideologi yang merupakan sistem berpikir dengan unsur-unsur (1) hubungan sebab akibat yang rasional, (2) kepercayaan dan asumsi yang dipilih dan (3) nilai dasar yang mendukungnya yang juga mendasari asumsi yang belum tentu juga benar, dapat ditemukan dalam kesusastraan, baik sebagai materi cerita maupun sebagai kekuatan yang mempengaruhi terbentuknya *genre* sastra. Hubungan antara konsep hidup dan tindakan manusia sangat erat, meskipun terlihat adanya tarik menarik antara kesadaran akan kebenaran dan dorongan untuk berbuat sesuai dengan apa yang diyakininya, namun, seringkali kita dapatkan konsep ideologi yang telah meresapi si tokoh menjadi kekuatan yang luar biasa. Apa yang kita lihat di dalam kehidupan nyata, seperti konsep kebebasan, otoritas atau kekuasaan tampak dengan lebih jelas lewat model yang digunakan pengarang dalam karyanya. Ketika pada akhirnya pembaca menangkap penerapan model dan kondisi yang diciptakan di dalam cerita, kita berhadapan, sebenarnya, dengan dunia nyata.

Formasi ideologi dapat ditelusuri melalui elemen material, kemudian dikaji lebih lanjut pada hal-hal yang berkaitan dengan elemen kesadaran, elemen solidaritas-identitas, dan elemen kebebasan. Keempat elemen tadi tidak harus muncul bersamaan. Elemen yang harus muncul adalah elemen material, yang berwujud berbagai aktivitas praktis dan menjelma dalam kehidupan keseharian, cara hidup kolektif masyarakat, lembaga, serta organisasi tempat praktik sosial berlangsung.

Formasi ideologi dalam materi teks sastra muncul melalui tokoh, latar (yang mencakup tempat, waktu, dan sosial), serta peristiwa. Dalam perspektif kajian ini, semua elemen tersebut merupakan representasi ideologi yang melekat pada setiap elemen tadi. Oleh karena itu, karya sastra disebut juga sebagai situs ideologi, karena teks sastra merupakan dialektika pemikiran pengarang itu sendiri yang dimunculkan melalui tokoh, latar, serta peristiwa. Oleh karena itu, fiksi tidak hanya sebagai wadah ideologi, tetapi juga sebuah alat yang menyenangkan dan senantiasa berhasil mentransmisikan ideologi tertentu kepada pembaca (Storey, 2007).

Williams (1977) mengembangkan konsep ideologi Gramsci. Dalam kajiannya terhadap teks sastra, Williams mencoba memahami kebudayaan sebagai lingkup yang tak terpisahkan. Williams membuat ciri pembeda antara ciri-ciri kebudayaan, yaitu kebudayaan tradisional atau residu atau juga disebut kebudayaan endapan, kebudayaan hegemoni atau dominan, dan kebudayaan bangkit. Kebudayaan residu merupakan kebudayaan masa lampau yang masih berjuang mempertahankan kehidupannya. Kebudayaan hegemoni merupakan kebudayaan yang dominan dalam kekuasaan. Kebudayaan bangkit merupakan kebudayaan yang sedang berjuang merebut hegemoni.

Bagi Gramsci, bentuk-bentuk organisasi kultural atau kebudayaan, merupakan objek yang menarik untuk diteliti secara konkret, terutama dalam hubungan dengan kemungkinan dioperasikannya dalam kehidupan praktis. Studi mengenai kebudayaan serupa itu, misalnya berupa sekolah dengan seluruh levelnya, gereja dengan

organisasi sosial besarnya, surat-surat kabar, majalah-majalah, perdagangan buku, juga apa saja yang komplementer bagi sistem negara, atau lembaga-lembaga kultural seperti universitas populer. Studi mengenai kebudayaan juga meliputi berbagai aktivitas kultural lainnya, seperti seni dan kesusastraan (Faruk, 1994).

Ada empat hal yang patut dicatat dari teori Gramsci dalam bandingannya dengan teori Marx. Pertama, Gramsci berpendapat bahwa di dalam masyarakat selalu terdapat pluralitas ideologi. Kedua, konflik tidak hanya antarkelas, tetapi konflik antara kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat global (umum) untuk mendapatkan kontrol ideologi dan politik terhadap masyarakat. Ketiga, jika Marx menyebut kelas sosial harus menyadari keberadaan dirinya dan memiliki semangat juang sebagai kelas, Gramsci menyatakan bahwa untuk menjadi kelompok dominan, kelompok harus mewakili kepentingan. Kelompok dominan harus berkoordinasi, memperluas, dan mengembangkan *interest*-nya dengan kepentingan-kepentingan umum kelompok *subaltern*. Kata kunci dalam pemahaman teori hegemoni Gramsci adalah negosiasi yang dibutuhkan untuk mencapai konsensus semua kelompok. Keempat, Gramsci berpandangan bahwa seni atau sastra berada dalam superstruktur. Seni diletakkan dalam upaya pembentukan hegemoni dan budaya baru. Seni membawa ideologi atau superstruktur yang kohesi sosialnya dijamin kelompok dominan. Ideologi tersebut merupakan wujud *counter-hegemoni* (hegemoni tandingan) atas hegemoni kelas penguasa yang dipertahankan anggapan palsu bahwa kebiasaan dan kekuasaan penguasa merupakan kehendak Tuhan atau produk alam. Seni merupakan salah satu upaya persiapan budaya sebelum sebuah kelas melakukan tindakan politik. Hal ini berarti bahwa sastrawan merupakan intelektual. Untuk mengidentifikasi ideologi, tidak hanya melihat karya sastra, tetapi juga memperhatikan pandangan dan intensi pengarang tentang kehidupan, serta kondisi sosial historis pada saat itu.

Kandungan ideologi dalam karya sastra dipahami dengan melakukan studi dekonstruksi, yakni suatu teori sastra yang bertujuan untuk

membongkar hierarki yang diakibatkan oleh cara berpikir yang logo sentris yang percaya bahwa makna dan realitas bersifat stabil. Dekonstruksi berusaha menunjukkan ketidakadilan yang tersembunyi melalui lubang-lubang teks yang membuat makna tidak stabil. Menurut Storey, mendekonstruksi berarti tidak sekadar menetralisasi oposisi biner, tetapi juga membuang hierarki dengan cara melakukan usaha agar yang tersembunyi menjadi nyata. Dengan demikian, mendekonstruksi dapat diartikan sebagai kegiatan membongkar pasang hierarki teks dengan tujuan untuk membangun kembali apa yang selama ini selalu disiratkan oleh teks (Sarup, 1993).

Pembacaan secara dekonstruktif tidak memiliki pengandaian teleologis seperti yang biasa diharapkan oleh banyak orang. Tidak ada makna yang ingin ditangkap. Setelah sebuah teks didekonstruksi, yang ada hanyalah permainan belaka, yang tidak mengarah kepada satu tujuan atau referensi, tetapi menyebar ke segala arah. Dengan kata lain, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menghentikan penyebarannya penafsiran-penafsiran baru yang sewaktu-waktu dapat mencuat tanpa disangka-sangka dari sebuah teks. Dalam pembacaan dekonstruktif, makna lebih dialami sebagai proses dari penafsiran (Al-Fayydl, 2006).

Sumber data kajian ini adalah novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan teknik analisis dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca data dengan tujuan mengidentifikasi data sesuai dengan teori yang digunakan.

Metode analisis data menggunakan metode hermeneutika. Menurut Ratna (2004), metode hermeneutika memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk analisis deskriptif. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau uraian secara sistematis faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Kajian ideologi tokoh wanita dalam kajian ini diformulasikan dengan perpaduan metode kritik sastra dekonstruksi dengan pendekatan sosiologi sastra melalui (1) penentuan latar

cerita; (2) mengidentifikasi tokoh-tokoh wanita pada karya yang dikaji; (3) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk ideologi tokoh wanita melalui tindakan, pikiran, dan dialog sang tokoh; (4) menghubungkan keterkaitan bentuk ideologi tokoh wanita dalam karya sastra (realitas fiksi) dengan realitas objektif; dan (5) menginterpretasikan sikap penulis sebagai bagian dari realitas sosial masyarakat terhadap bentuk ideologi tokoh wanita yang terefleksi dalam karyanya.

REFLEKSI IDEOLOGI WANITA MINANGKABAU DALAM NOVEL *NEGERI PEREMPUAN*

Berdasarkan perbuatan, pikiran, ucapan dan dialog tokoh, ada dua bentuk ideologi yang terefleksi dalam novel ini. Kedua bentuk ideologi itu adalah ideologi sosial dan ideologi politik. Bentuk ideologi sosial yang terefleksi dalam novel ini adalah ideologi sosiobudaya feodal yang didukung oleh tokoh-tokoh wanita pewaris kerajaan, yakni tokoh Bundo dan tokoh Reno. Sebaliknya, ideologi sosiobudaya kedua adalah ideologi neofeodal yang didukung oleh tokoh Bu Lansia, istri pejabat pemerintahan, dan tokoh Merrajuti, adik dari saudagar kaya raya *Nagariko*. Ideologi politik tokoh yang terefleksi dalam novel ini adalah ideologi tokoh wanita yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisi kerajaan yang didukung oleh tokoh wanita pewaris kerajaan dan ideologi politik tokoh wanita yang ingin melakukan pembaharuan terhadap tradisi yang didukung oleh tokoh Bu Lansia dan Merrajuti.

Munculnya kedua ideologi tersebut bersumber dari budaya adat, terutama dalam hal pengangkatan *penghulu* dan membangun *rumah gadang*. Dari sumber ini pula muncul dua oposisi ideologi yang saling bertentangan, yakni ideologi tokoh wanita pewaris kerajaan bersikukuh untuk mempertahankan tata cara pengangkatan penghulu dan pembangunan rumah gadang sesuai dengan tradisi adat yang berlaku dengan tokoh Bu Lansia dan Merrajuti yang berkeinginan untuk merombak tradisi. Akibatnya adalah munculnya dua konflik, yakni konflik internal dan konflik eksternal. Konflik

internal terjadi antarsesama anggota keluarga pewaris kerajaan, yaitu konflik antara Bundo dan Reno dengan Oncu. Oncu selalu tidak sependapat terhadap setiap keputusan yang diambil Bundo dan Reno karena ia merasa setiap keputusan yang diambil Bundo dan Reno selalu merugikan. Konflik eksternal terjadi antara tokoh perempuan pewaris kerajaan dengan orang luar (orang kaya dan penguasa yang diwakili oleh tokoh Merrajuti dan Bu Lansia).

Kedua konflik tersebut merupakan biang keladi (penyebab utama) terjadinya konflik internal karena merasa terganggu dengan orang luar untuk mengurus kerajaan. Ideologi yang ingin dibangun berdasarkan konflik internal dengan eksternal adalah di *Negeri Perempuan* yang selama ini berideologi demokratis, egaliter, mengambil keturunan dan harta dari garis ibu, yang menganggap kedudukan manusia sama, tetapi karena pengaruh eksternal berubah ke idealisme dan paham neofeodal. Mereka mulai membeda-bedakan orang berdasarkan asal-usul dan gelar kebangsawanan. Untuk mendapatkan gelar kebangsawanan itu, mereka melakukan berbagai cara meskipun tidak sesuai dengan adat *Nagariko* (latar cerita novel ini) sendiri, seperti yang dilakukan Bu Lansia untuk memperoleh gelar bangsawanan suaminya Barajoan (pejabat pemerintahan). Konflik memuncak terjadi ketika pembangunan Puri Alam sebagai pengganti rumah Bundo yang dijadikan museum. Berubahnya mata pencaharian penduduk dari petani menjadi penjual jasa bertambah bebas, dan luasnya pergaulan akibat banyaknya orang luar berkunjung ke Puri Alam juga berakibat terhadap idealisme tokoh-tokoh perempuan dalam novel ini ikut bergeser dari idealisme feodal menjadi idealisme neofeodal. Sebelum pembangunan Puri Alam, keluarga pewaris kerajaan hidup dengan tenang, adat berjalan sebagaimana mestinya, setiap orang menyadari posisinya dalam adat, tetapi setelah Puri Alam dibangun, keluarga pewaris kerajaan mulai terusik karena kaum penguasa dan proletar menginginkan tempat yang diduduki Bundo itu sebab kaum penguasa dan kaya belum merasa puas dan terhormat manakala belum berhasil mendapatkan kedudukan seperti keluarga Bundo.

Peristiwa pembangunan Puri Alam, yakni sebuah museum megah yang dibiayai pemerintah Nagari (setting cerita), pada awalnya yang akan dibangun hanya sebuah rumah sebagai pengganti rumah Bundo yang terbakar di lokasi yang sama. Rumah Bundo yang terbakar itu merupakan istana raja, tetapi ketika pembangunan akan dimulai timbul bermacam-macam ideologi, baik yang mendukung keberadaan Bundo maupun yang tidak menghormatinya. Akhirnya, Puri Alam tersebut dibangun tidak persis di lokasi rumah Bundo yang terbakar, tetapi di tanah lain meskipun tanah tersebut milik keluarga Bundo juga. Ketika akan diresmikan, timbul suatu problem apakah peresmian itu secara adat atau secara pemerintah. Seluruh penghulu di negeri itu semuanya mengancam dan akhirnya Puri Alam diresmikan secara adat. Meskipun persoalan peresmian itu sudah jelas, persoalan lain yang muncul adalah ketika memilih anggota keluarga yang akan duduk di singgasana. Menurut adat seharusnya yang duduk di singgasana itu adalah Engku, tetapi dia tidak bersedia, ia menunjuk tokoh Muning anak Bundo sebagai penggantinya. Akan tetapi Oncu, adik Bundo menganggap tokoh Mangun (anaknya) yang pantas karena Mangun lebih tua dua hari dari Muning. Engku tetap memilih Muning untuk didudukkan di singgasana sebagai *Raja Alam* pada upacara tersebut.

Kehadiran Puri Alam sebagai tujuan wisata mulai mengubah ideologi masyarakat. Sebagian masyarakat, terutama yang fanatik terhadap adat dan pro terhadap tokoh Bundo dan Reno mengutuk atas kehadiran Puri Alam tersebut, sedangkan sebagian lainnya terutama tokoh Merrajuti dan Bu Lansia menerima realitas itu dengan hati yang lega karena dengan kehadiran Puri Alam sebagai objek wisata mereka dapat mempengaruhi dan mengambil simpatik dari masyarakat agar mereka dapat menjual jasa, mendirikan warung untuk berjualan dan memperbaiki ekonomi. Ini dilakukan Merrajuti dan Bu Lansia untuk mengukuhkan keberadaannya sebagai adik orang kaya dan istri pejabat penguasa yang mempunyai ideologi neofeodal. Kehadiran Puri Alam juga berpengaruh terhadap pola berpikir dan berpakaian anak-anak muda. Adat dan sopan

santun yang selama ini menjadi kebanggaan negeri ini pun tidak dihiraukan lagi bahkan keluarga Bundo sekali pun dilecehkan. Menghadapi kemelut ini, untunglah ada tokoh Reno anak perempuan Bundo menyelesaikan dilema tersebut sebagai seorang perempuan bangsawan yang berideologi feodal.

Reno adalah anak perempuan Bundo yang sulung. Ia adalah seorang dosen di fakultas pertanian. Ia sering pulang ke kampung untuk membantu ibunya menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga. Reno digambarkan sebagai perempuan yang taat beragama, cekatan, cerdas, dan mempunyai pandangan yang luas serta peduli terhadap perubahan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat dan kaum kerabatnya. Kepedulian itu digambarkan pengarang, “... bukan karena ia mau kembali hidup pada zaman raja-raja tempo dulu, tapi perubahan yang kini terjadi akan mempengaruhi segala aspek kehidupan” (hlm.10). Tokoh Reno juga memaklumi keadaan masyarakatnya yang masih lemah dari sektor ekonomi, pendidikan yang rendah dan dasar agama yang goyah, sehingga nilai-nilai yang mereka anut akan mudah terpengaruh dan tentu akan menerima perubahan tanpa saringan. Oleh karena itu, Reno berpikir tentang kaumnya.

“Perjuangan perempuan negeri ini ternyata tidak seperti dulu lagi. Persoalan yang kita hadapi sekarang bukan lagi kawin paksa, ditinggal suami merantau, tanah pusaka digadaikan mamak ke bank! Tetapi bagaimana kita dapat mencegah setiap usaha yang akan dapat menghancurkan kebanggaan kita, pengaburan sejarah kita....” (hlm.35)

Pernyataan tokoh Reno merembes pada pemahaman yang diamatinya pada pergeseran nilai-nilai, seperti kawin paksa, suami yang meninggalkan istrinya untuk merantau, dan mamak yang mengadaikan harta kaumnya yang sering terjadi pada masa lalu, tidak relevan lagi dialami pada masa sekarang. Pergeseran nilai tersebut diideologikan sebagai hal yang tidak penting dibahas, tetapi seharusnya adalah mencarikan jalan keluar dari pergeseran tersebut. Tokoh

Reno menyaran pada usaha untuk mencegah agar kebanggaan sebagai perempuan Minang tidak luntur sehingga perempuan Minang seharusnya bersikap lebih bijak dan mampu mempertahankan kehormatannya.

Di samping bijak, Reno juga temperamental. Kalau ada orang yang menurutnya tidak seideologi dengannya dan akan merusak urusan adat keluarganya sebagai pewaris kerajaan, tidak peduli pejabat tinggi sekalipun, ia akan marah. Hal ini terlihat dari perlakuannya terhadap tokoh Burik yang suka melecehkan keluarganya, Reno berkata, "*Kalau mau berolok-olok jangan bawa-bawa keluargaku!*" (hlm.9). Akibatnya, Burik terpaksa minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu. Banyak orang yang ingin berbicara pada Bundo tentang efek samping pembangunan Puri Alam, tetapi mereka takut berhadapan dengan Reno seperti terlihat pada kutipan berikut.

"Yang membuat mereka takut bicara di hadapan Bundo bukan karena Bundo, tetapi Reno. Karena jika ada kesalahan dan pelanggaran sopan santun yang mereka lakukan baik sengaja atau tidak, Reno pasti akan memarahi mereka habis-habisan. Seakan Reno tidak takut pada siapa pun." (hlm.10)

Kutipan tersebut menegaskan bahwa ideologi dan pandangan tokoh Reno mengasosiasikan dirinya sebagai seseorang yang tidak takut untuk menyatakan suatu kebenaran. Selanjutnya, perlakuan yang sama juga ditunjukkan Reno terhadap gadis-gadis yang suka menjual tampang di Puri Alam, dengan nasihat:

"Nagariko ini dikenal sebagai pusat adat. Negeri yang terkenal dengan peninggalan sejarah. Karena itu pula pemerintah mau mendirikan Puri Alam di tanah kita. Tapi kalian melecehkan!

Menghina sejarah dan leluhur. Aku tahu kalian memerlukan berbagai penyaluran dari desak kegadisan dan kegatalan remaja kalian. Kau calak mato, gincu bibir, inai kuku dan kau juga

Cucuak sangguah! Di depanku kalian pura-pura mengerti, cengangguk-angguk, menangis terisak-isak! Besok pagi kalian berdiri di halaman Puri Alam, tertawa cekikikan, berpakaian tidak karuan dan menggoda setiap lelaki! Tidak begitu caranya mencari laki, tahu! Kalau mau kawin, katakan padaku terus-terang. Aku akan carikan suami yang sepadan untuk kalian.

Sekiranya tidak seorang pun laki-laki yang mau mengawini kalian, akan kujemput hantu-hantu jantang dari gunung Patah

Tujuh itu! Tapi jangan jadi gadis jangak!" (hlm.13)

Kutipan tersebut menjelaskan kepedulian tokoh Reno terkait fenomena pergeseran nilai-nilai ideologi perempuan Minang yang sudah kabur. Kepedulian tersebut "terbungkus" pada kodrat perempuan Minang yang seharusnya tidak melecehkan dan menghina sejarah. Bentuk ideologi tersebut merupakan salah satu bentuk ideologi neofeodal yang mengarah pada tatanan kekuasaan yang menyimpang pada warisan lama. Tokoh Reno berpandangan dengan memaparkan satu per satu bentuk pelecehan dan penghinaan tersebut seperti mencalak mata, mengincu bibir, menginai kuku, berpakaian tidak karuan, dan menggoda laki-laki. Ideologi neofeodal yang tercermin pada tokoh Reno adalah usahanya dalam memberi petunjuk pada perempuan-perempuan Minang bahwa seharusnya perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi pada saat ini dan seharusnya perempuan Minang mencari suami yang lebih sepadan.

Selain itu, Barajo, Bu Lansia, Merrajuti, Palimo Parangusai dan Pak Sati adalah orang-orang penting yang pernah merasakan kemarahan dan hardikan Reno. Apalagi terhadap orang-orang biasa seperti Burik dan Masam. Reno hanya marah kalau orang-orang itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ideologinya dan tata cara adat keluarganya, seperti yang dirasakan Palimo berikut.

"Palimo! Payung kuning itu bukan milik kalian! Aku yang berhak memutuskan siapa yang harus dipayungi dan siapa yang tidak!

Payung itu tidak boleh dikeluarkan. Sudah

kuberi kebebasan di rumahku malah mau mengambil semua apa yang ada Palimo tahu, bukan si Joan yang harus dipayungi dengan payung pusakaku! Katakan kepada induk semangmu itu. Dia tidak akan dipayungi dengan payungku walau berepa pun tinggi pangkatnya di negeri ini!” (hlm. 129-130)

Kutipan tersebut merupakan salah satu bentuk ideologi feodal dari tokoh Reno. Tokoh Reno mempertahankan bentuk ideologinya secara feodal dengan mempertahankan harta pusakanya. Pusaka yang dimaksud adalah payung kuning yang seharusnya dialah atau kaum kerajaanlah yang tepat menyimpan pusaka tersebut. Ideologi tersebut ditujukan pada panglimo atau pemerintah yang ingin mengambil pusaka tersebut. Kasus tersebut mencerminkan bahwa ideologi feodal pada tokoh Reno terkait harta pusaka kerajaan tetap dipertahankannya sehingga dia memiliki hak penuh terhadap kekuasaan tersebut. Selain itu, ketika Bajoan datang minta maaf atas kesalahan Palimo, dengan sinis Reno mengatakan Barajoan tidak tahu adat sehingga wajah Barajoan berubah pucat pasi.

“E, Pak Joan! Anak buah Bapak yang tidak tahu adat jangan suruh ke rumahku ini! Jangan disangka orang di sini tidak ada yang mengerti adat. Upacara apa pun bentuknya, penghulu-penghulu di sini lebih paham dari mereka. Kalau mau beradat, ikuti adat di rumah ini. Bukan kami yang harus mengikuti adat kalian.” (hlm.131).

Sebagai anak perempuan sulung, Reno diharapkan Engku dan Bundo untuk menggantikan perannya sebagai pengayom masyarakat. Oleh sebab itu, kalau ada masalah-masalah dalam negeri, Bundo selalu meminta Reno pulang untuk menyelesaikannya. Reno mampu menyelesaikan. Bundo dan Engku membiarkan dan mengedepakannya. Kalau Reno sudah minta bantuan barulah kedua orang itu tampil memberikan saran atau memberi kata putus. Bahkan, kalau Bundo telah mengizinkan Reno memutuskan sesuatu, semua penghulu negeri itu akan patuh. Hal ini terlihat dari keputusan Reno memberikan gelar *penghulu Bakaresi* kepada

Barajoan (kepala daerah atau penguasa di daerah tersebut). Semua penghulu-penghulu yang terkenal kritis dan pandai petatah-petitih menerima sebuah putusan dari seorang perempuan ...”Apa yang dikatakan Dipertuan Gadis tadi merupakan titah raja kami.Tugas kami menjalankan, bukan mempertanyakan.” (hlm.117)

Berdasarkan data-data tersebut jelas bahwa di dalam novel *Negeri Perempuan* ini pengarang memperlihatkan dominasi kekuasaan perempuan. Hal ini terlihat dengan ditonjolkannya tokoh Reno dalam setiap pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kerajaan, meskipun tokoh Reno sendiri mempunyai seorang adik laki-laki, yakni tokoh Muning. Akan tetapi karena Muning tidak mempunyai ideologi yang kokoh, setiap ada permasalahan selalu dipercayakan pada Reno untuk menyelesaikannya. Ketidakkokohan ideologi Muning itu terlihat ketika ia disuruh tokoh Engku mengantarkan Rajasyah (orang kaya yang berasal dari negeri sembilan Malaysia yang orang tuanya juga sebagai pewaris kerajaan) menemui Barajoan (pemerintah) dalam rangka pembangunan rumah sembilan ruang. Muning merasa kurang mampu sehingga ia harus mengadukan pada dan mengajak Reno. Realitas di atas bertentangan dengan konsep “mamak” dalam masyarakat Minangkabau yang matriakat mengacu pada sistem kekerabatan ibu. Namun, perempuan Minang tidak memiliki kekuasaan dan otoritas dalam mengambil keputusan. Keputusan berada di tangan saudara laki-laki si perempuan atau “nirik mamak”. Dengan demikian, kekuasaan dan otoritas masih berada di tangan laki-laki.

Konstruksi dominasi tokoh Bundo dan Reno dalam keluarga kerajaan, dominasi tokoh Merrajuti terhadap saudara laki-lakinya, dan dominasi Bu Lansia terhadap suaminya merupakan bukti nyata bahwa di *Negeri Perempuan* tidak mempertimbangkan dan menghargai etnik mereka. Secara tidak langsung novel ini menyiratkan kepada pembaca bahwa novel ini ingin memenangkan ideologi matriarkhat atas ideologi patriarkhat. Namun pengarang juga menyadari bahwa ideologi ini tidak akan bertahan. Hal ini terbukti dari pengakuan tokoh Reno sendiri yang pada akhirnya

juga mempunyai keterbatasan. Beragamnya masalah membuat dia membatin. Ia tidak akan mungkin lari dari tanggung jawab sebagai pewaris keturunan raja *Nagariko*.

“ Tapi kodrat kewanitaannya kadang-kadang memperlihatkan sisi-sisi kelemahannya. Sesaat dia merasa tidak berdaya. Seakan dia sendiri sedang berdayung melawan arus. Sampai seberapa lamanya dia tahan berdayung, sementara beban perahunya semakin sarat dan arus semakin kuat. Sesaat dia menyesali dirinya, kenapa harus dilahirkan sebagai perempuan. Kenapa tidak sebagai seorang laki-laki perkasa yang dapat membusungkan dada di galadak kapal saat badai menerpa kapalnya.” (hlm.270-271)

Dalam perspektif feminis, kekuasaan diterjemahkan sebagai kekuasaan yang ada di dalam diri sendiri. Keberdayaan ini mengarah pada makna “kemampuan diri” atau “kemampuan kontrol internal”. Para feminis menganggap perempuan yang berdaya adalah perempuan yang mampu mengarahkan dirinya untuk tidak didominasi atau mendominasi. Kebebasan dan otonomi perempuan yang berdaya tidaklah dengan mengorbankan yang lain. Menurut Thomson (1984), ada empat macam kekuasaan yang saling tumpang tindih, menyatu dan berinteraksi, yaitu *power over* (mendominasi); *power from within* (kesadaran); *power with* (bekerja sama); dan *power to* (mampu), sedangkan level kekuasaan ada tiga, yakni *personal power* (kekuasaan personal) *relational power* (kekuasaan hubungan) dan *group power* (kekuasaan kelompok).

Konstruksi tokoh Bondo dan Reno dalam novel ini digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang memiliki semua elemen *power to*, *power from within*, *power with*, dan *power over*. Mereka menyadari mereka memiliki kelebihan, yakni status sosial yang lebih tinggi sebagai pewaris kerajaan untuk memperjuangkan ideologi mereka, yakni kekuasaan untuk mempertahankan kejayaan masa lalu, sedangkan tokoh Merrajuti yang mempunyai *power with* dengan saudara laki-lakinya dan tokoh

Bu Lansia yang mempunyai kekuasaan dengan suaminya juga membentuk kelompok untuk mendapatkan *power over* dan memperjuangkan ideologi mereka. Inilah dominasi perempuan yang diperlihatkan Wisran, yakni perempuan pasca-feminis, perempuan pascaterbakarnya rumah Bundo.

IDEOLOGI WANITA MINANGKABAU DALAM NOVEL NEGERI PEREMPUAN

Ada dua ideologi wanita Minangkabau yang terefleksi dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi, yakni ideologi sosial dalam bentuk ideologi feodal dan neofeodal. Munculnya dua ideologi tokoh wanita yang saling beroposisi dalam novel ini bersumber dari adat, terutama dalam tata cara pengangkatan penghulu dan membangun *rumah gadang*. Bagi wanita pewaris kerajaan, pengangkatan penghulu idealnya harus didasarkan pada tata cara pengangkatan, kedudukan, dan fungsi penghulu yang sesuai dengan adat yang telah berlaku secara turun-temurun. Namun, realitas sekarang menunjukkan bahwa kedudukan penghulu tidak lagi sebagaimana mestinya. Kini bagi masyarakat *Nagariko* (latar novel ini) kedudukan penghulu hanya dipandang sebagai status sosial meskipun mereka tidak memahami tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh seorang penghulu. Begitu berartinya kedudukan *penghulu* bagi masyarakat *Nagariko*, semua laki-laki atau anggota kaum ingin mendapatkan gelar tersebut dengan segala cara. Bahkan, jasa para penghulu sudah mulai dihargai dengan uang oleh mereka yang berharta. Masyarakat Minangkabau sekarang banyak memandang kedudukan penghulu sebagai status sosial meskipun mereka tidak memahami tugas dan kewajiban seorang penghulu. Oleh karena pemahaman yang salah, mereka sangat ambisius untuk mendapatkan gelar penghulu.

Semua tokoh dalam novel ini ingin menjadi penghulu atau pewaris kerajaan, baik yang tua dan berjabatan maupun rakyat biasa. Hal ini terlihat dari ambisi tokoh Bu Lansia yang memperjuangkan suaminya Barajoan (pejabat tinggi) dan Diringgiti (pengusaha kaya raya) yang diusahakan sekuat tenaga oleh adiknya

Merrajuti untuk mendapatkan gelar penghulu. Ia berpandangan bahwa jabatan politik dan kekayaan yang melimpah itu belum cukup untuk mengukuhkan kebesarannya. Situasi ini menimbulkan kekacauan dalam keluarga pewaris kerajaan karena satu per satu kebanggaannya diambil dan keluarganya dilecehkan. Selain itu, hal yang paling tidak disukai oleh pewaris kerajaan adalah cara-cara yang digunakan oleh orang kaya dan pejabat itu untuk mendapatkan gelar penghulu. Mereka menghalalkan semua cara asal gelar kebangsawanan itu mereka peroleh, seperti memalsukan silsilah, membeli gelar, dan mengubah-ubah aturan adat.

Ketika di kampung banyak orang yang enggan menjadi penghulu, datang orang dari kota untuk mendapatkan gelar itu. Sayangnya, mereka itu tidak memahami adat di “negeri perempuan”. Mereka hanya mengandalkan jabatan, pangkat, dan kekayaan sehingga yang muncul ke permukaan adalah ideologi neofeodal, jabatan penghulu pindah dari pemilik tanah ke pemilik modal atau penguasa. Akibat dari ideologi itu, banyak gadis yang hidup hedonis dan menjual tampang di Puri Alam serta para pemuda menjadi pemalas yang juga berakibat pada banyaknya lahan pertanian yang tidak tergarap

Terjadinya pergeseran peran dan fungsi penghulu di Minangkabau disebabkan oleh beberapa hal, antara lain (1) adanya pengangkatan penghulu yang tidak sesuai dengan persyaratan adat, (2) adanya penghulu baru yang berasal dari orang luar atau pendatang yang tidak paham dengan kedudukan dan tugas-tugas yang harus dijalankan, dan (3) adanya unsur-unsur kepentingan politik dalam pengangkatan penghulu. Pengangkatan penghulu ini terjadi karena adanya tekanan dan pengaruh dari para penguasa.

Kedua ideologi wanita yang saling berposisi itu (feodal vs neofeodal) juga terefleksi dalam membangun *rumah gadang*. Bagi wanita yang berideologi feodal, keberadaan *rumah gadang* selain berfungsi sebagai tempat tinggal dan berhimpunnya anak kemenakan, serta *bundo kanduang*, juga berfungsi sebagai simbol pengkultusan suatu kaum. Ia juga dijadikan sebagai

standar keberadaan suatu kaum yang terhormat dan berstatus sosial tinggi. Oleh karena itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar bisa mendirikan *rumah gadang*. Pertama, mereka harus berasal dari pribumi atau keturunan raja-raja. Kedua, mereka harus memiliki *penghulu* yang keberadaannya diakui oleh para penghulu lainnya secara turun-temurun. Ketiga, rumah tersebut harus didirikan di atas tanah kaum atau tanah pusaka.

Berbeda halnya dengan wanita yang berideologi neofeodal. Mereka tidak mempedulikan syarat-syarat pendirian *rumah gadang* tersebut. Tokoh Merrajuti misalnya, supaya ia dapat diakui sebagai keturunan bangsawan dan berstatus sosial tinggi, ia tidak malu mendirikan *rumah limo ruang* (rumah lima ruang) meskipun melanggar aturan-aturan mendirikan rumah lima ruang. *Rumah limo ruang* hanya boleh didirikan oleh penghulu, sementara Merrajuti sendiri tidak memiliki penghulu yang akan memimpin dalam rumah itu. Demikian juga dengan Bu Lansia, ia selalu menggunakan kekuasaan suaminya (Barajoan) untuk mendapatkan tanah pusaka untuk mendirikan *rumah gadang*. Akibatnya adalah masyarakat Nagariko tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka diancam dengan kekerasan. Hal ini terlihat dari sikap Barajoan yang semena-mena menggunakan kekuasaannya sebagai kepala daerah dan penghulu untuk mengelola tanah pusaka milik Bundo. Barajoan bertindak sekehendak hati tanpa ada musyawarah dengan pihak keluarga pewaris. Meskipun orang-orang Nagariko berasal dari nenek moyang yang sama, tetapi dalam sistem kepemilikan tanah pusaka tidak semua kaum dapat memiliki tanah pusaka. Orang-orang Nagariko memiliki hak tersendiri dalam sistem kepemilikan tanah pusaka.

Pada hakikatnya, penggunaan tanah pusaka adalah untuk kepentingan bersama, tetapi tidak dapat digunakan bergitu saja tanpa ada kesepakatan melalui musyawarah dari anggota kaum itu sendiri. Hal itulah yang terjadi dalam keluarga Bundo. Barajoan sebagai kepala daerah tidak memahami hakikat penggunaan dan pengelolaan tanah pusaka dan batas-batas wewenang dalam pengelolaan

tanah pusaka. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Barajoan memperlakukan tanah pusaka suatu kaum dengan semena-mena.

Oposisi ideologi feodal dan neofeodal itu melahirkan dua corak budaya politik, yakni ideologi politik yang berpretensi positif dan yang berpretensi negatif. Ideologi ini terlihat dari aktivitas keluarga pewaris kerajaan, sedangkan ideologi yang berpretensi negatif didukung oleh keluarga di luar pewaris kerajaan dan pendukungnya. Di dalam keluarga pewaris kerajaan, tokoh Reno aktif melibatkan diri ke dalam aktivitas sosial politik. Dengan ideologi politiknya itu, tokoh Reno selalu berpikir bagaimana caranya agar masyarakat kembali kepada tata cara adat dan sopan santun. Dalam hal ini jelas bahwa Reno memperlihatkan peran sosial politiknya sebagai penentu.

Di dalam keluarga nonpewaris kerajaan, tokoh Bu Lansia dan Merrajuti mempunyai peran yang dominan dalam aktivitas politik. Bahkan mereka lebih dominan ketimbang suami dan kakaknya. Aktivitas politik tokoh Merrajuti terlihat dari ambisinya untuk membangun *rumah limo ruang* untuk kebanggaan kaumnya bahkan dia pula yang mencarikan jalan agar saudaranya Diringgiti menjadi penghulu, sedangkan aktivitas politik Bu Lansia tergambar pada upayanya untuk mengusahakan gelar penghulu bagi suaminya Barajoan, tetapi aktivitas sosial politik yang dilakukannya adalah dengan menghalalkan semua cara sehingga menimbulkan kesan negatif.

Jika hal ini dikaitkan dengan realitas objektif, di Minangkabau saat memang sedang terjadi transformasi ideologi dalam hal pembangunan dan pemberian gelar adat. Ada kelompok masyarakat yang tetap teguh untuk mempertahankan norma-norma yang berlaku sesuai dengan ajaran adat, tetapi juga banyak kelompok masyarakat yang menginginkan pembaharuan. Hal ini terlihat dengan banyaknya para pejabat dan para konglomerat yang menyanggah gelar adat meskipun kadang kala mereka itu bukan pewaris gelar adat itu dan berada di perantaraan. Demikian juga dalam hal pembangunan *rumah gadang*, tidak sedikit dari *rumah gadang* yang terdapat di Minangkabau dibangun oleh para pejabat dan konglomerat.

Realitas ini menunjukkan kepada kita bahwa di Minangkabau (di negeri perempuan) sedang terjadi pergeseran ideologi masyarakat, termasuk ideologi kaum perempuan. Pergeseran ini terjadi akibat dampak logis dari perubahan pola berpikir masyarakat, yakni dari pola berpikir masyarakat agraris ke pola berpikir masyarakat industri. Kalau pada era agraris nilai-nilai budaya yang membentuk ideologi perempuan Minangkabau masih terbatas pada nilai adat dan agama (Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah; syarat mengatakan, adat memakai) yang memosisikan perempuan dalam stereotipnya sebagai orang kukuh, kuat dan anggun sehingga mereka dilambangkan dengan predikat *bundo kanduang* yang artinya berideologi matrilineal. Dengan ideologi itu, perempuan Minang menjadi figur sentral dalam keluarga. Semua persoalan dinisbatkan pada perempuan seperti dalam hal warisan termasuk dalam hal kebijakan dalam penentuan gelar adat.

Kini di era industri, predikat *bundo kanduang* mulai berubah. Kekuatan perombak pertama adalah ekonomi dan kekuasaan penguasa. Kalau dulu pada era agraris kekuatannya menyatu pada tanah, sekarang perlu ada pelengkapannya, yakni dengan berniaga, membuka usaha, dan mendapat gaji dari pemerintah sehingga ideologi perempuan Minang dalam praktiknya telah menyatu dengan perempuan Indonesia, dan ciri-ciri khasnya nyaris tidak kelihatan lagi. Dari kondisi ini, hal pertama yang tampak memudar dalam ideologi perempuan Minangkabau adalah ideologi ke-*bundokanduang-an*-nya itu. Citra *bundo kanduang* di Sumatra Barat sekarang mulai berpindah kepada pribadi-pribadi istri pejabat dan istri atau saudara para saudagar kaya yang telah berhasil di rantau karena mereka perlu aktif menunjang dan menyukseskan tugas suami atau saudaranya. Kalau laki-laki memainkan peranan paternalistik-kebakapan, perempuan memainkan peranan maternalisme-keibuan. Akibat kondisi ini, citra perempuan Minangkabau sebagai *bundo kanduang* menjurus kearah yang bersifat "pelengkap penderita", bukan lagi sebagai penentu. Dia tidak lagi mempunyai kepribadian tersendiri dan keanggunan tersendiri. Dia telah

menjadi apendiks, bergayut kepada sistem yang berlaku.

Dari realitas objektif ini dapat dikatakan bahwa di Minangkabau sedang terjadi transformasi ideologi pada diri perempuan Minangkabau dari yang berideologi tradisional (feodal) ke ideologi nasional (neofeodal) sekarang ini, menuju ideologi pragmatis global di masa depan. Bila hal ini dikaitkan dengan realitas fiksi (realitas cerita dalam novel *Negeri Perempuan* yang menceritakan ideologi feodal tokoh perempuan pewaris kerajaan sebagai pemilik tanah dan warisan, dan ideologi neofeodal tokoh perempuan istri pejabat penguasa dan tokoh perempuan Saudara konglomerat tampaknya Wisran Hadi ingin mengatakan kepada kita bahwa sekarang di Minangkabau atau di *Negeri Perempuan* sedang terjadi transformasi ideologi dalam masyarakat Minangkabau. Kalau dulu yang berkuasa adalah pemilik tanah, sekarang yang berkuasa adalah penguasa dan pemilik modal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada dua bentuk ideologi yang terefleksi dalam novel *Negeri Perempuan* karya Wisran Hadi ini. Kedua bentuk ideologi itu adalah ideologi sosial dan ideologi politik. Ideologi sosial yang menonjol adalah ideologi feodal dan neofeodal. Ideologi feodal terefleksi pada tokoh wanita pewaris kerajaan yang selalu berpandangan masalah warisan dan tatacara pengangkatan penghulu sesuai dengan aturan adat yang berlaku, sedangkan ideologi neofeodal yang didukung oleh tokoh wanita istri pejabat dan saudara konglomerat berpandangan bahwa tata cara warisan dan tata cara pengangkatan penghulu itu bukanlah sesuatu yang tidak perlu disakralkan, tetapi amat fleksibel dan dapat dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi kekinian.

Ideologi politik yang terefleksi dalam novel ini mempunyai dua corak, yaitu ideologi politik yang berpretensi positif dan yang berpretensi negatif. Ideologi positif terlihat dari aktivitas keluarga pewaris kerajaan, sedangkan ideologi yang

berpretensi negatif didukung oleh keluarga di luar pewaris kerajaan dan pendukungnya.

Kedua bentuk ideologi tokoh wanita yang direfleksikan dalam novel ini merupakan pencerminan realitas kehidupan nyata yang terjadi di Minangkabau saat ini. Saat ini kedua bentuk ideologi wanita itu memicu terjadinya konflik internal (wanita pewaris kerajaan) dengan pihak eksternal (wanita istri pejabat dan saudara konglomerat). Hal ini terjadi karena wanita pewaris kerajaan yang berideologi feodal merasa terganggu dengan orang luar untuk mengurus kerajaan. Sebab, di *Negeri Perempuan* yang selama ini berideologi demokratis, egaliter, mengambil keturunan dan harta dari garis ibu, yang menganggap kedudukan manusia sama, tetapi karena pengaruh eksternal berubah ke idealisme dan paham neofeodal.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fayyadl, Muhammad. (2006). *Derrida*. Yogyakarta: LKIS.
- Althusser, Louis. (2008). *Tentang Ideologi: Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies* (Terjemahan Olsy Vinoli Arnof). Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra.
- Faruk. (2001). *Beyond Imagination: Sastra Mutakhir dan Ideologi*. Yogyakarta: Gama.
- Faruk. (2003). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, Antonio. (1985). *Selection from the Prison Notebooks*. Edisi dan Terjemahan Quin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publisher.
- Goldmann, Lucient. (1977). *The Hidden God: A Study of Tragic Vision in the Pensées of Pascal and the Tragedies of Racine*. Terjemahan Inggris Philip Thody. London: Routledge and Kegan Paul.
- Hadi, Wisran. (2001). *Negeri Perempuan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hoggart, Richard. (1975). *Contemporary Cultural Studies: An Approach to the Study of Literature and Sociology*. In Malcol, Bradbury and David Palmer (ed.) *Contemporary Criticism*. London: Edward Arnold.
- John, Storey. (2007). *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Norris, Christopher. (2006). *Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida* (Terjemahan Inyik Ridwan Muzir). Yogyakarta: Arruz Media.

- Ratna, I Nyoman Kuta. (2004). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarup, Madan. (2008). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme & Posmodernisme* (Terjemahan Medhy Aginta Hidayat). Yogyakarta: Jalasutra.
- Simon, Roger. (2000). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thompson, John B. (1984). *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia*. Yogyakarta: Ircisod.
- Williams. Raymond. (1977). *Marxism and Literature*. New York: Oxford University Press.